

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2019 - 2021

Muhamad Hasbi Fadila

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani
muhamadhasbi_2360107031@ak.unjani.ac.id

Dwi Indah Lestari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani
dwiindah@ak.unjani.ac.id

Abstract

This study analyzes the effect of General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), and Special Allocation Fund (DAK) on Regional Original Revenue (PAD) of regencies and cities in West Java for the 2019–2021 fiscal years. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression methods to examine the relationships between variables. The results indicate that DAU, DBH, and DAK have a significant impact on PAD both partially and simultaneously. Among the three, DBH has the most substantial influence on PAD. These findings suggest that despite having independent revenue sources, regional governments still rely heavily on central government transfers.

Keywords: *General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, Regional Original Revenue, Flypaper Effect.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun anggaran 2019–2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh paling besar terhadap PAD dibandingkan DAU dan DAK. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun daerah memiliki sumber PAD sendiri, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.

Kata Kunci: *Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Flypaper Effect*

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia telah diterapkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan lokal. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan

berbagai bentuk transfer dana kepada daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utama dari dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih mengalami ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang berpotensi menciptakan fenomena Flypaper Effect, di mana belanja daerah lebih bergantung pada transfer pusat dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) yang diusahakan sendiri (Kuncoro, 2007).

Berikut merupakan fenomena data kuantitatif yang diolah dengan data beberapa sampel pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Barat yang memiliki Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dengan kategori tinggi ($2,07 < KFD < 2,384$) dan sangat tinggi ($\geq 2,384$) namun belum memiliki Indeks Kemandirian Fiskal Daerah dengan kategori mandiri ($< 0,5$) pada tahun 2019.

Tabel 1. Tren Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (dalam Miliar Rupiah)

Daerah	PAD		
	2019	2020	2021
Kab. Bandung	1025,35	1019,36	1095,97
Kab. Bekasi	2439,37	2384,14	2544
Kab. Bogor	3161,17	2810,16	3761,91
Kab. Garut	486,57	474,64	560,78
Kab. Karawang	1356,32	1303,35	1651,85
Kab. Majalengka	439,84	490,88	466,79
Kab. Sukabumi	619,79	660,86	676,56
Kota Bandung	2548,26	2063,78	2195,97
Kota Bekasi	2442,15	2048,91	2536,71
Kota Depok	1293	1214,94	1536,97

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu)

Beberapa daerah di Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 2019 hingga 2021, seperti Kabupaten Sukabumi yang naik dari 619,79 menjadi 676,56, serta Kabupaten Bogor dan Karawang yang mengalami lonjakan signifikan pada 2021 setelah sempat turun di 2020. Kota Depok juga mengalami pemulihan kuat dengan PAD mencapai 1536,97 pada 2021. Sebaliknya, beberapa daerah mengalami penurunan, seperti Kota Bandung yang turun tajam pada 2020 dari 2548,26 menjadi 2063,78 dan belum kembali ke level sebelum pandemi, serta Kota Bekasi yang juga mengalami pola serupa. Selain itu, ada daerah dengan tren fluktuatif, seperti Kabupaten Majalengka yang meningkat pada 2020 tetapi kembali turun pada 2021, serta Kabupaten Bandung dan Garut yang mengalami pola serupa. Perbedaan pola pertumbuhan ini mencerminkan dampak ketidakpastian ekonomi selama periode tersebut.

Tabel 2. Perbandingan DAU dan PAD pada Beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2021 (dalam Miliar Rupiah)

Daerah	DAU			PAD		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kab. Bandung	2159,83	1967,82	1947,25	1025,35	1019,36	1095,97
Kab. Bekasi	1264,78	1105,27	1096,9	2439,37	2384,14	2544
Kab. Bogor	2089,13	1849,8	1863,2	3161,17	2810,16	3761,91
Kab. Garut	1843,83	1663,19	1665,91	486,57	474,64	560,78
Kab. Karawang	1325,36	1211,64	1199,91	1356,32	1303,35	1651,85
Kab. Majalengka	1.252,08	1127,92	1112,16	439,84	490,88	466,79
Kab. Sukabumi	1654,34	1494,7	1491,04	619,79	660,86	676,56
Kota Bandung	1798,1	1589,63	1566,04	2548,26	2063,78	2195,97
Kota Bekasi	1277,17	1147,63	1137,89	2442,15	2048,91	2536,71
Kota Depok	950,37	844	843,69	1293	1214,94	1536,97

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu)

Tren Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pola yang bervariasi di berbagai daerah, dengan kecenderungan menurun di sebagian besar wilayah, mengindikasikan meningkatnya kemandirian finansial daerah. Walidi (2009) menyatakan bahwa daerah dengan PAD tinggi cenderung menerima DAU lebih rendah karena realisasi PAD memengaruhi alokasi DAU tahun berikutnya. Contohnya, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan persentase DAU per PAD dari 2019 hingga 2021, menunjukkan peran PAD yang semakin dominan dalam struktur pendapatan daerah. Namun, beberapa daerah seperti Kabupaten Bogor menunjukkan pola fluktuatif, mengindikasikan bahwa meskipun PAD meningkat, ketergantungan terhadap DAU masih cukup signifikan. Variasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kapasitas pengumpulan PAD, serta prioritas pembangunan di masing-masing daerah.

Tabel 3. DBH dan PAD pada beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2021 (dalam Miliar Rupiah)

Daerah	DBH			PAD		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kab. Bandung	515,07	321,18	718,04	1025,35	1019,36	1095,97
Kab. Bekasi	341,32	420,85	586,33	2439,37	2384,14	2544
Kab. Bogor	315,7	249	517,72	3161,17	2810,16	3761,91
Kab. Garut	289,36	192,75	391,33	486,57	474,64	560,78
Kab. Karawang	319,6	351,91	442,98	1356,32	1303,35	1651,85
Kab. Majalengka	73,17	96,11	129,17	439,84	490,88	466,79
Kab. Sukabumi	222,01	137,61	364,1	619,79	660,86	676,56
Kota Bandung	252,78	350,12	429,31	2548,26	2063,78	2195,97
Kota Bekasi	114,99	170,18	211,62	2442,15	2048,91	2536,71
Kota Depok	83,71	125,68	158,39	1293	1214,94	1536,97

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu)

Sebagian besar daerah mengalami peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari 2019 hingga 2021, dengan lonjakan signifikan pada 2021 setelah penurunan di 2020. Namun, hubungan antara DBH dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu konsisten. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Bekasi, menunjukkan peningkatan PAD yang sejalan dengan kenaikan DBH, sementara di daerah lain, seperti Kabupaten Majalengka, peningkatan DBH tidak diikuti oleh pertumbuhan PAD. Beberapa daerah

mengalami fluktuasi baik dalam DBH maupun PAD, seperti Kabupaten Bandung, Bogor, Garut, dan Sukabumi, sedangkan Kabupaten Majalengka dan Kota Bandung justru mengalami penurunan PAD meskipun DBH meningkat. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pengaruh DBH terhadap PAD bervariasi di setiap daerah, bahkan dalam beberapa kasus, DBH pajak justru berpengaruh negatif terhadap PAD. Hal ini menciptakan gap penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas DBH dalam meningkatkan PAD.

Tabel 4. DBH dan PAD pada beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2021 (dalam Miliar Rupiah)

Daerah	DAK			PAD		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kab. Bandung	710,45	695,02	668,38	1025,35	1019,36	1095,97
Kab. Bekasi	337,16	333,41	337,08	2439,37	2384,14	2544
Kab. Bogor	744,51	734,88	695,6	3161,17	2810,16	3761,91
Kab. Garut	717,99	679,25	670,8	486,57	474,64	560,78
Kab. Karawang	868,91	438,25	463,8	1356,32	1303,35	1651,85
Kab. Majalengka	433,24	421,17	464,63	439,84	490,88	466,79
Kab. Sukabumi	590,11	507,11	598,6	619,79	660,86	676,56
Kota Bandung	437,69	475,86	461,96	2548,26	2063,78	2195,97
Kota Bekasi	299,13	324,85	328,52	2442,15	2048,91	2536,71
Kota Depok	193,79	222	189,05	1293	1214,94	1536,97

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu)

Tren penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) terlihat di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bandung, Garut, dan Kota Depok, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka tetap meningkat, menunjukkan bahwa penurunan DAK tidak selalu berdampak negatif pada PAD. Sebaliknya, ada daerah seperti Kabupaten Bogor yang berhasil meningkatkan PAD meskipun DAK mengalami penurunan dari 2019 hingga 2021. Beberapa daerah mengalami tren fluktuatif, seperti Kabupaten Karawang yang mengalami penurunan DAK pada 2020 tetapi meningkat kembali pada 2021, dengan PAD yang mengikuti pola serupa. Kota Bandung juga menunjukkan pola fluktuatif, di mana DAK sempat naik pada 2020 sebelum menurun pada 2021, sementara PAD cenderung menurun pada 2020 sebelum mengalami sedikit peningkatan di tahun berikutnya. Variasi pola ini menunjukkan bahwa hubungan antara DAK dan PAD tidak selalu linear, dengan beberapa daerah mampu meningkatkan PAD meskipun DAK berkurang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh DAU, DBH, dan DAK terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dengan menguji keberadaan Flypaper Effect dan pola hubungan antar variabel keuangan daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Umum pada kabupaten dan kota di Jawa Barat selama tahun anggaran 2019–2021, serta mengkaji Dana Bagi Hasil dalam periode yang sama. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Dana Alokasi Khusus di kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun anggaran 2019–2021, serta mengevaluasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rentang waktu tersebut. Selanjutnya, penelitian ini berupaya untuk memahami pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik secara parsial maupun simultan, khususnya pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam periode tahun anggaran 2017–2019.

Penelitian ini memiliki kegunaan baik dari aspek teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori keuangan pemerintah daerah dengan mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun anggaran 2017–2019, sehingga dapat memperkaya kerangka kerja teoritis dalam bidang keuangan pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, seperti penulis yang dapat menambah wawasan mengenai pengaruh berbagai dana transfer terhadap Pendapatan Asli Daerah serta memperdalam pemahaman terkait isu keuangan daerah. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi serupa di masa depan. Sementara itu, bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat membantu optimalisasi kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Fiscal Illusion* pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia bernama Amilcare Puviani yang menggambarkan terjadinya ilusi fiskal pada saat pembuat keputusan memiliki kewenangan dalam suatu institusi sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu (Priyo, 2009). Dalam arti lain, ilusi fiskal mengemukakan bahwa *flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Pemerintah daerah sebenarnya menghasilkan output yang diminta oleh masyarakat dan Pemerintah Pusat, tetapi permintaan masyarakat untuk barang publik didasarkan pada kesalahan persepsi tentang bagaimana pembiayaan barang publik dan pembagian biaya yang ditanggung masyarakat. Dengan kata lain masyarakat daerah memang melihat hasil output yang sebenarnya dari pengeluaran pemerintah terhadap barang publik dan manfaat yang diperoleh namun mempunyai persepsi yang salah. Ilusi fiskal terjadi karena pendapatan pemerintah tidak sepenuhnya transparan atau

tidak sepenuhnya dirasakan oleh pembayar pajak, maka biaya dalam menjalankan pemerintahan dipandang lebih rendah dari yang sebenarnya oleh masyarakat. Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya adalah melalui pengukuran pendapatan/revenue enhancement (Bergstrom & Goodman, 1973; Dollery & Worthington, 1999) dan melalui manipulasi belanja (*expenditure manipulation*).

Teori Agensi merupakan kegiatan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agents) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal (Meckling & Jensen, 1976). Menurut Meckling & Jensen (1976:308), teori agensi ini menyatakan bahwa adanya pemisahan antara principal dan agent akan memunculkan permasalahan agensi karena pihak- pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya masing- masing.

Inman (2008) menyatakan bahwa "*Flypaper effect* pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an oleh Henderson (1968) dan Gramlich (1969). Henderson dan Gramlich mencari penjelasan tentang bagaimana demografi dan ekonomi berkorelasi dengan anggaran pemerintah. Setiap satu dolar tambahan dari pendapatan pribadi meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar \$0,02 – \$0,05, tetapi untuk tiap tambahan dollar dari transfer pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar \$0,3 - \$1. Ketika mereka mempresentasikan hasilnya, seorang rekan bernama Arthur Okun menciptakan frasa terkenal akibat efek pemerintah pada pengeluaran yaitu *flypaper*, '*money sticks where it hits*.'" *Flypaper effect* dianggap sebagai suatu penyimpangan dalam perilaku rasional jika dana transfer dianggap sebagai tambahan pendapatan oleh daerah, sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Flypaper effect* memberikan implikasi bahwa transfer menstimulus belanja daerah yang lebih besar dari pada peningkatan pendapatan daerah (Turnbull, 1998).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia, 2005).

Menurut Williantara dan Budiasih (2016) Dana bagi hasil adalah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang dimana pemerintah pusat mengalokasikan dananya ke masing-masing daerah berdasarkan presentase yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dana bagi

hasil untuk menanggulangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Dana bagi hasil adalah sumber pendapatan yang merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah tentunya harus menggunakan pendapatan daerah berupa dana bagi hasil untuk menumbuhkan dan mensejahterakan masyarakat dengan mengelola kekayaan daerah secara proporsional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya digunakan belanja modal (Waskito et al., 2019).

Menurut Undang – undang Nomor 13 Tahun 2005, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Indonesia, 2005).

Menurut Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Indonesia, 2004).

Boadway dan Shah (2006) menyatakan bahwa menghitung kapasitas fiskal daerah dapat dikatakan sulit baik secara konsep maupun empiris. Kesulitan ini muncul karena kapasitas fiskal daerah, yang secara sederhana berarti kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dari sumber daya yang dimilikinya, sangat bervariasi. Akibatnya, perhitungan kapasitas fiskal daerah dapat berbeda di suatu negara dibandingkan negara lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri (Sugiyono, 2019). Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah mengenai fenomena dapat konkrit, obyektif, rasional, dapat diukur dan sistematis (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Pada Tahun Anggaran 2019 - 2021. Daerah ini mencakup beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten

Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran. Selain itu, penelitian ini juga mencakup beberapa kota, yakni Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Unit analisis = Populasi $\times$ 3 tahun anggaran

Unit analisis = 27×3

Unit analisis = 81

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 81 Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Pada Tahun Anggaran 2019 – 2021.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu riset kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Riset kepustakaan dilakukan untuk memperoleh teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, peraturan perpajakan yang berlaku, literatur akademik, serta teori-teori dari buku kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pencatatan dan pengutipan dari buku-buku pengawas atau laporan-laporan realisasi APBD yang diperoleh dari berbagai sumber yang andal dan relevan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mencakup analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah, melalui ukuran statistik seperti mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011).

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat statistik yang diperlukan, termasuk uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji distribusi normal data (Ghozali, 2016).

Selain itu, dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance di atas 0,1 dan variance inflation factor (VIF) di bawah 10 untuk memastikan tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen (Ghozali, 2016).

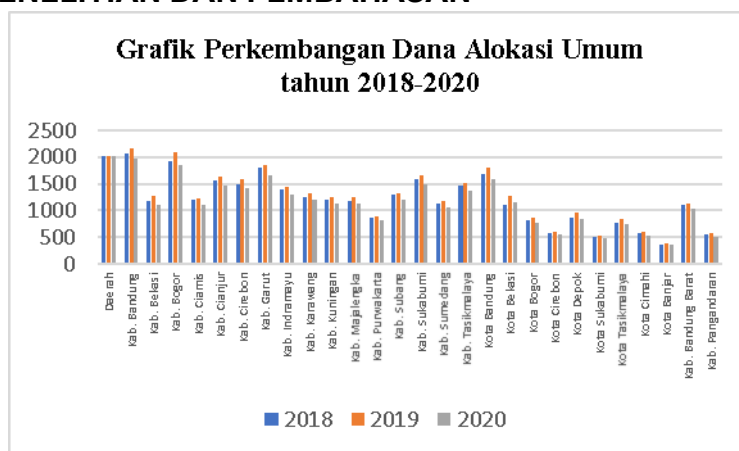
Uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* (uji DW) untuk mengetahui apakah ada korelasi antara residual periode t dengan periode sebelumnya, dengan kriteria pengujian berdasarkan nilai dL dan dU (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi apakah ada ketidaksamaan varians residual antar pengamatan (Ghozali, 2016).

Setelah model lolos uji asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk memprediksi pengaruh Dana Alokasi Umum (X1), Dana Bagi Hasil (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), menggunakan persamaan regresi dengan konstanta dan koefisien regresi sebagai faktor pengaruhnya (Ghozali, 2016).

Uji hipotesis parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan kriteria pengujian jika nilai t hitung $\geq$ t tabel, maka hipotesis alternatif diterima, sementara jika t hitung $\leq$ t tabel, hipotesis nol diterima (Ghozali, 2016). Uji hipotesis simultan (uji F) bertujuan untuk menguji pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016).

Terakhir, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, dengan nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang tinggi, sedangkan nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen hanya menjelaskan sedikit dari variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

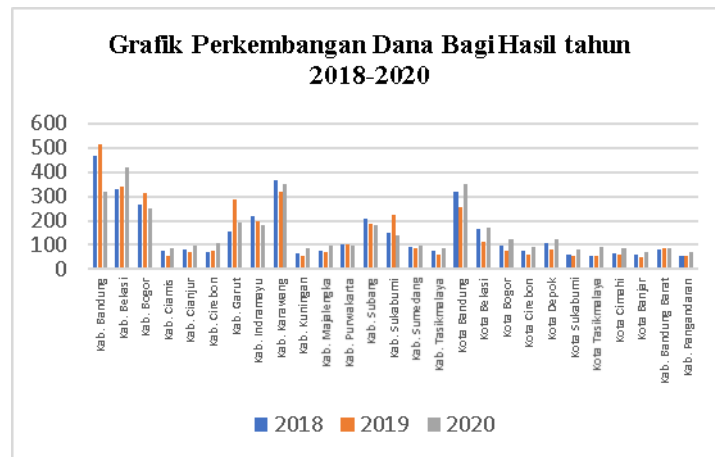
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Gambaran Grafik Perkembangan Dana Alokasi Umum

Sumber: Olah Data Sekunder (2024)

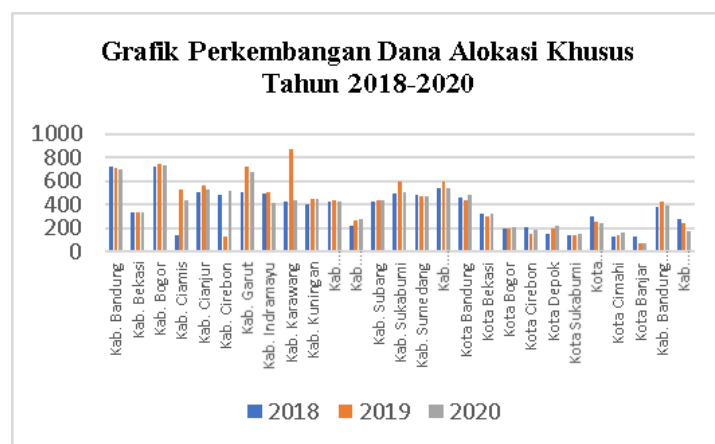
Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami fluktuasi di berbagai daerah dari tahun 2018 hingga 2020. Total DAU meningkat dari 31.537,54 miliar rupiah pada 2018 menjadi 33.173,59 miliar rupiah pada 2019, namun menurun menjadi 29.834,06 miliar rupiah pada 2020. Kabupaten Bandung consistently menerima DAU tertinggi, dengan puncaknya pada 2019 sebesar 2.159,83 miliar rupiah, sedangkan Kota Banjar menerima alokasi terendah, dengan nilai terendah 351,74 miliar rupiah pada 2020. Beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung mengalami penurunan DAU dari 2019 ke 2020, yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian anggaran berdasarkan perubahan kebutuhan atau kondisi ekonomi.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Dana Bagi Hasil

Sumber: Olah Data Sekunder (2024)

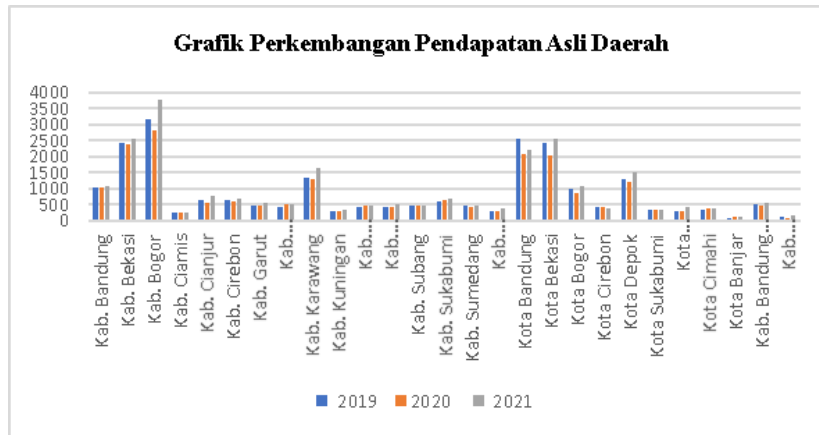
Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2020. Total DBH menurun dari 3.940,58 miliar rupiah pada 2018 menjadi 3.908,37 miliar rupiah pada 2019, namun kembali meningkat menjadi 4.148,09 miliar rupiah pada 2020. Kabupaten Bandung menerima DBH tertinggi pada 2018 dan 2019, dengan puncaknya sebesar 515,07 miliar rupiah pada 2019, tetapi pada 2020, Kabupaten Bekasi mencatat penerimaan tertinggi sebesar 420,85 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran selalu menjadi penerima DBH terendah, dengan nilai terendah pada 2019 sebesar 50,31 miliar rupiah dan sedikit meningkat menjadi 72,98 miliar rupiah pada 2020.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Sumber: Olah Data Sekunder (2024)

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami variasi dari tahun 2018 hingga 2020. Total DAK meningkat dari 9.935,35 miliar rupiah pada 2018 menjadi 10.889,24 miliar rupiah pada 2019, sebelum sedikit menurun menjadi 10.440,91 miliar rupiah pada 2020. Kabupaten Bandung menerima alokasi DAK tertinggi pada 2018 dan 2020, masing-masing sebesar 717,01 miliar rupiah dan 695,02 miliar rupiah, sementara pada 2019, Kabupaten Karawang memperoleh alokasi tertinggi dengan nilai 868,91 miliar rupiah.



Gambar 4. Grafik Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Olah Data Sekunder (2024)

Kabupaten Bogor mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi selama tiga tahun berturut-turut, dari Rp 3.161,17 miliar pada 2019, turun menjadi Rp 2.810,16 miliar pada 2020, lalu meningkat signifikan menjadi Rp 3.761,91 miliar pada 2021. Kabupaten Bekasi consistently berada di posisi kedua dengan PAD yang juga mengalami fluktuasi, dari Rp 2.439,37 miliar pada 2019 menjadi Rp 2.384,14 miliar pada 2020, dan naik menjadi Rp 2.544 miliar pada 2021. Sebaliknya, Kota Banjar selalu mencatatkan PAD terendah, dari Rp 100,75 miliar pada 2019 menjadi Rp 119,43 miliar pada 2020, dan meningkat sedikit menjadi Rp 127,10 miliar pada 2021. Kabupaten Pangandaran juga berada di antara daerah dengan PAD terendah, meskipun mengalami peningkatan dari Rp 105,28 miliar pada 2020 menjadi Rp 175,13 miliar pada 2021. Pola ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor tetap menjadi daerah dengan PAD tertinggi, sementara Kota Banjar konsisten sebagai daerah dengan PAD terendah selama periode 2019-2021.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	13.274	184.228		.072
	Dana Alokasi Umum	.699	.304	.410	2.303
	Dana Bagi Hasil	4.085	.753	.587	5.427
	Dana Alokasi Khusus	1.558	.689	.381	2.261

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Berdasarkan Tabel 5 diatas, maka dapat dilihat persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$DAK = 3.274 + 0.699 \text{ DAU} + 4.085 \text{ DAH} + 1.558 \text{ DAK} + \epsilon$$

Konstanta dalam persamaan regresi sebesar 13.274 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Bagi Hasil/DAH, dan Dana Alokasi Khusus/DAK) bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetap sebesar 13.274. Konstanta ini merepresentasikan nilai dasar dari PAD yang tidak dipengaruhi oleh variabel independen dalam model.

Persamaan ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DAH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koefisien pada Dana Alokasi Umum sebesar 0.699 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu rupiah pada DAU akan meningkatkan PAD sebesar 0.699 rupiah, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selanjutnya, koefisien Dana Bagi Hasil sebesar 4.085 menunjukkan pengaruh yang paling signifikan dibandingkan variabel lainnya, di mana setiap peningkatan satu rupiah DAH akan meningkatkan PAD sebesar 4.085 rupiah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus memiliki koefisien 1.558 yang berarti bahwa peningkatan satu rupiah pada DAK akan meningkatkan PAD sebesar 1.558 rupiah.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	13.274	184.228		.072	.943
	Dana Alokasi Umum	.699	.304	.410	2.303	.024
	Dana Bagi Hasil	4.085	.753	.587	5.427	.000
	Dana Alokasi Khusus	1.558	.689	.381	2.261	.027

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Berdasarkan Tabel 6 diatas, hasil uji hipotesis parsial atau uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai t-hitung untuk DAU adalah 2.303, sedangkan DBH memiliki nilai t-hitung tertinggi sebesar 5.427, dan DAK memiliki nilai t-hitung sebesar 2.261. Jika dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (dengan derajat kebebasan $81-3=78$), t-tabel adalah 1.990. Karena t-hitung untuk semua variabel lebih besar dari t-tabel, maka hipotesis bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima.

Nilai signifikansi (Sig.) untuk semua variabel juga lebih kecil dari 0,05, yang menguatkan bahwa pengaruhnya signifikan. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus semuanya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil uji t, nilai t-hitung untuk DAU adalah 2.303, sementara nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 78 adalah 1.990. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2.303 > 1.990$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi DAU yang diterima, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD, yang terjadi karena DAU membantu daerah dalam pembiayaan kegiatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Deo Rizki Vanchris, Fadli dan Siti Aisyah (2013) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sama halnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Tradinatama & Solikhin (2023) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena DAU memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Nilai t-hitung untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 5.427 merupakan yang tertinggi di antara ketiga variabel yang diuji dan jauh melebihi t-tabel sebesar 1.990, sehingga hipotesis bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap PAD, karena peningkatan DBH memberikan daerah sumber daya lebih besar untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Sebagai transfer dana dari pemerintah pusat berdasarkan persentase pendapatan negara, seperti pajak dan sumber daya alam, DBH memungkinkan daerah memperluas kapasitas fiskalnya untuk membiayai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Efisiensi dalam penggunaan DBH dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*), di mana meningkatnya aktivitas ekonomi daerah turut mendorong kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi sebagai komponen utama PAD. Selain itu, tingginya pengaruh DBH terhadap PAD juga mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup besar, sehingga diperlukan strategi optimal dalam pengelolaannya agar daerah dapat meningkatkan penerimaan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Daerah yang mampu memanfaatkan DBH secara strategis akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan pajak yang lebih baik serta pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nasution dan Rimanda (2021) yang menyimpulkan bahwa Dana bagi hasil berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Lilis Astutiawaty, Carolyn Lukita, dan Devi Astriani (2022) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Nilai t-hitung yang diperoleh adalah 2.261, yang juga lebih besar dari nilai t-tabel 1.990, sehingga hipotesis bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap PAD diterima. Pengaruh DAK terhadap PAD secara signifikan, mengindikasikan bahwa penggunaan DAK yang tepat sasaran dapat meningkatkan PAD, terutama jika dana tersebut digunakan untuk proyek yang dapat menghasilkan pendapatan langsung bagi daerah, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian lokal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Rasulong (2012) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sama halnya, hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian dari Irmawati Rosaeni (2024) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama untuk daerah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sektor kesehatan.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a			F	Sig.
Model		Sum of Squares	df	Mean Square		
1	Regression	20413858.797	3	6804619.599	20.011	.000 ^b
	Residual	26183179.617	77	340041.294		
	Total	46597038.413	80			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum

Sumber: Olah Data SPSS (2024)

Berdasarkan Tabel 7 diatas, hasil uji hipotesis simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 20.011. Jika dibandingkan dengan F-tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan dengan derajat kebebasan (df) regresi 3 dan residual 77, nilai F-tabel adalah sekitar 2,72. Karena F-hitung (20.011) lebih besar dari F-tabel (2,72), maka hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima. Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uji hipotesis parsial dan simultan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2017–2019. Secara parsial, DAU berpengaruh positif terhadap PAD dengan t-hitung 2.303 dan signifikansi 0,024, mendukung teori ilusi fiskal bahwa peningkatan DAU mendorong belanja daerah dan PAD. DBH memiliki pengaruh paling kuat dengan t-hitung 5.427 dan signifikansi 0,000, sesuai teori flypaper effect bahwa daerah lebih mengandalkan dana transfer daripada pajak lokal. DAK juga berpengaruh signifikan dengan t-hitung 2.261 dan signifikansi 0,027, mendukung penelitian bahwa DAK membantu penguatan fiskal daerah. Secara simultan, ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan F-hitung 21,830 dan signifikansi 0,000. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) 2019–2021 menunjukkan rata-rata masih dalam kategori "Belum Mandiri" (0,22–0,24), dengan beberapa daerah seperti Bekasi dan Bogor masuk kategori "Menuju Kemandirian" (0,30–0,39), sementara daerah seperti Ciamis dan Garut memiliki IKF rendah, menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya peningkatan PAD, ketergantungan terhadap dana transfer masih menjadi tantangan utama bagi banyak daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Rasulong (2012) yang menyimpulkan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sama halnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Lilis Astutiawaty, Carolyn Lukita, dan Devi Astriani (2022) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun anggaran 2019 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Total DAU tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 33.173,59 miliar rupiah, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 29.834,06 miliar rupiah. Kabupaten Bandung menjadi penerima DAU tertinggi, sedangkan Kota Banjar menerima DAU terendah selama tiga tahun berturut-turut. Penurunan DAU di beberapa daerah mencerminkan adanya penyesuaian anggaran akibat perubahan kebutuhan fiskal dan kondisi ekonomi.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun anggaran 2019 hingga 2021 menunjukkan pola fluktuasi. Pada tahun 2019, total DBH sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3.908,37 miliar rupiah, tetapi meningkat pada tahun 2020 menjadi 4.148,09 miliar rupiah. Kabupaten Bandung memperoleh DBH tertinggi pada tahun 2018 dan 2019, sementara pada tahun 2020 Kabupaten Bekasi mencatat penerimaan tertinggi. Sebaliknya, Kabupaten Pangandaran menerima DBH terendah selama tiga tahun berturut-turut.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun anggaran 2019 hingga 2021 mengalami variasi dalam alokasinya. Tahun 2019 mencatat total DAK tertinggi sebesar 10.889,24 miliar rupiah, sementara pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 10.440,91 miliar rupiah. Kabupaten Bandung memperoleh alokasi DAK tertinggi pada tahun 2018 dan 2020, sedangkan pada tahun 2019, Kabupaten Karawang mencatat alokasi tertinggi. Sebaliknya, Kota Banjar secara konsisten menerima DAK terendah selama tiga tahun berturut-turut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun anggaran 2019 hingga 2021 menunjukkan tren yang bervariasi. Kabupaten Bogor secara konsisten mencatat PAD tertinggi selama tiga tahun berturut-turut, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp 3.761,91 miliar. Kabupaten Bekasi menempati posisi kedua dengan PAD tertinggi setiap tahun. Sebaliknya, Kota Banjar secara konsisten mencatat PAD terendah selama tiga tahun berturut-turut, dengan nilai minimum sebesar Rp 100,75 miliar pada tahun 2019. Meskipun Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan PAD pada tahun 2021, daerah ini tetap berada di antara penerima PAD terendah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik secara parsial maupun secara simultan.

Saran

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pemerintah daerah, khususnya yang memiliki PAD rendah seperti Kota Banjar, perlu meningkatkan upaya dalam mengoptimalkan potensi pendapatan lokal melalui diversifikasi sumber pendapatan, inovasi pajak, dan retribusi.

Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah: Peningkatan kemampuan pengelolaan fiskal di daerah sangat penting. Daerah perlu mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan meningkatkan kapasitas untuk menggali sumber daya lokal dan menciptakan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

Pemanfaatan Dana Transfer Secara Efektif: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dikelola secara efektif dengan memastikan alokasi tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan sektor prioritas yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Transfer: Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dengan fokus pada pembiayaan yang dapat mendorong produktivitas dan pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan Keuangan Daerah yang Terintegrasi: Diperlukan perencanaan keuangan yang terintegrasi antara DAU, DBH, DAK, dan PAD untuk memastikan bahwa alokasi dana dapat saling melengkapi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 242–262.
- Bergstrom, T. C., & Goodman, R. P. (1973). Private demands for public goods. *The American Economic Review*, 63(3), 280–296.
- Boadway, R., & Shah, A. (2006). *Intergovernmental fiscal transfers: principles and practice*.
- Dollery, B., & Worthington, A. (1999). Fiscal illusion at the local level: an empirical test using Australian municipal data. *Economic Record*, 75(1), 37–48.

- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 19. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, 19.
- Ghozali, I. (2016). *Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya*.
- Gramlich, E. M. (1969). State and local governments and their budget constraint. *International Economic Review*, 10(2), 163–182.
- Henderson, J. M. (1968). Local government expenditures: A social welfare analysis. *The Review of Economics of Statistics*, 156–163.
- Indonesia, R. (2004). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang. *Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. *Pemerintah Indonesia*.
- Inman, R. P. (2008). *The flypaper effect*. National Bureau of Economic Research.
- Kuncoro, H. (2007). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Atas Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat. *The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia*.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Nasution, A. R. (2021). *Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Investasi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Seluruh Kabupaten Di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Priyo, H. A. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–19.
- Rasulong, I. (2012). Implikasi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Takalar. *Jeb*, 8(2).
- Sugiyono, D. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Vanchris, D. R., Fadli, F., & Aisyah, S. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumbagsel Tahun 2008-2012). *Jurnal Fairness*, 3(2), 135–144.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pada indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044–2070.